



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 26 Agustus 2021.
Pukul	: 09.00 Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.
Hadir Komisi X DPR RI	: 34 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Sandiaga Salahuddin Uno (Menparekraf/Kepala Baparekraf RI) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.26 WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenparekraf/Baparekraf RI atas capaian Opini BPK Tahun 2020 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mempertahankan capaian prestasi ini pada tahun-tahun berikutnya. Namun terkait realisasi anggaran sebesar 92,56 %, Komisi X DPR RI mendorong agar realisasi tersebut dapat ditingkatkan dan mencapai di atas rata-rata realisasi anggaran secara nasional untuk tahun-tahun mendatang.

2. Terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2020 dalam hal pendapatan, belanja, dan asset, Komisi X DPR RI mendorong agar Kemenparekraf/Baparekraf RI secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tindak lanjutnya dan melakukan evaluasi secara komprehensif agar temuan-temuan tersebut tidak terjadi kembali pada tahun 2021, serta menjadikannya sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan ke depan.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan K/L terkait untuk tetap mempertahankan program-program tahun 2020 terkait mitigasi terhadap pelaku pariwisata dan ekraf yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021, seperti program penguatan penciptaan lapangan kerja, perlindungan pelaku usaha parekraf, dan pemberian stimulus.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengkaji kembali secara benar dan teliti mengenai capaian kinerja Kemenparekraf/Baparekraf RI TA 2020, sebagaimana disajikan dalam halaman 15 bahan paparan, dan selanjutnya disampaikan kepada Komisi X DPR RI.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melengkapi paparan mengenai tindak lanjut hal-hal pokok temuan dalam LKPP Kemenparekraf/Baparekraf RI TA 2020 yang dikeluarkan oleh BPK RI, antara lain terkait Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan beberapa temuan berikut:
 - a. *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No.3.1 atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam LHP No.61/LHP/XVI/02/2021*). (hal. 17)
 - b. Pengelolaan kegiatan dukungan kepada industri perhotelan yang dimanfaatkan oleh tenaga medis dan tenaga pendukung Rumah Sakit Rujukan Covid-19 pada Deputy Industri dan Investasi, dan Deputy Bidang Pemasaran yang tidak sesuai ketentuan (*Temuan No.3.2 atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam LHP No.61/LHP/XVI/02/2021*). (hal. 23)
 - c. Pelaksanaan kegiatan masak bersama master secara *online* pada Direktorat Fesyen, Desain dan Kuliner Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif yang belum sesuai ketentuan (*Temuan No.3.3 atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam LHP No.61/LHP/XVI/02/2021*). (hal. 41)
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memiliki data akurat mengenai pelaku parekraf yang terdampak pandemi Covid-19, baik yang telah mendapatkan stimulus atau bantuan dari Kemenparekraf/Baparekraf RI maupun K/L lainnya.
7. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menindaklanjuti aspirasi para pelaku parekraf yang menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI karena terdampak pandemi Covid-19. (*Catatan: Data pelaku parekraf yang menyampaikan aspirasi akan disampaikan Komisi X DPR RI kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI*).

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.14

**Menparekraf/
Kepala Baparekraf RI**



Sandiaga Salahuddin Uno

Ketua ²⁹



Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M